



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

TAHUN 2016



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan Eksekutif	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	3

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Sekretaris Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2016	9
B. Kegiatan Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2016	12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2016	14
B. Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2016	27

BAB IV PENUTUP

Penutup	29
---------	----

LAMPIRAN

Pengukuran Kinerja Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2016
Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2016

DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Hal
Tabel 1	Perjanjian Kinerja Setditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2016	9
Tabel 2	Indikator Data dan Informasi	14
Tabel 3	Indikator PUG Pendidikan	16
Tabel 4	Indikator Program dan Anggaran	16
Tabel 5	Indikator Evaluasi Program dan Anggaran	17
Tabel 6	Indikator Laporan Keuangan	18
Tabel 7	Indikator Hukum dan Tata Laksana	20
Tabel 8	Indikator Kerjasama dan Kehumasan	21`
Tabel 9	Indikator SDM PAUD dan Dikmas	23
Tabel 10	Indikator Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan	25
Tabel 11	Indikator Tertib BMN	26
Tabel 12	Serapan Anggaran per Jenis Belanja	27

DAFTAR GAMBAR

No.	Nama Gambar	Hal
Gambar 1	Struktur Organisasi Setditjen PAUD dan Dikmas	8
Gambar 2	Foto Pertemuan Regional Penyiapan SEAMEO CECCEP	15
Gambar 3	Foto Kegiatan Rakornas PAUD dan Dikmas Tahun 2016	17
Gambar 4	Foto Kegiatan Penyusunan LAKIP Ditjen PAUD dan Dikmas	18
Gambar 5	Foto Pelantikan Pengurus Majelis Pembimbing dan Pimpinan Saka Pramuka Widya Budaya Bakti	22
Gambar 6	Foto Posko Tentara Manunggal Masuk Desa	23
Gambar 7	Foto Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV	24
Gambar 8	Grafik Serapan Anggaran Total Setditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2016	27

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala berkah dan karunia-Nya sehingga kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Setditjen PAUD dan Dikmas) dapat terlaksana dengan baik. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada instansi pemerintah untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja. Setditjen PAUD dan Dikmas menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai upaya penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Setditjen PAUD dan Dikmas atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan dukungan teknis manajemen di bidang PAUD dan Dikmas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Setditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2016 merupakan pertanggungjawaban dan informasi atas capaian sasaran strategis dalam lingkup Setditjen PAUD dan Dikmas perealisasi target Renstra Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2015-2019. LAKIP ini juga diharapkan sebagai bahan evaluasi dan koreksi untuk mengetahui prestasi yang diraih dan permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Tentunya, LAKIP Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2016 ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan perhatian seluruh pimpinan juga para pemangku kepentingan di lingkungan Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas, untuk melanjutkan dan merealisasikan tujuan dan memperbaiki kinerja dalam perealisasi target Rencana Strategis tahun berikutnya.

Jakarta, Januari 2017
 Sekretaris,

 Wartanto, MM.
 NIP. 196310091989031001

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2016 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan dijabarkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Fungsi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang diemban oleh Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas adalah untuk memenuhi tujuan strategis ketersediaan sistem tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan. Pengukuran pencapaian tujuan strategis tersebut ditetapkan di dalam sasaran strategis dan tertuang dalam tujuh belas indikator kinerja.

Pada tahun 2016, dari sepuluh indikator kinerja, Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas telah melaksanakan seluruh indikator kinerja dengan realisasi yang beragam, dengan capaian pelaksanaan anggaran sampai dengan tahun 2016 sebesar 90,81%.

Adapun rincian capaian indikator kinerja Setditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2016 hasilnya sembilan Indikator Kinerja Sesuai Target dan satu indikator kinerja di bawah target seperti tersaji di bawah ini:

A. Indikator Kinerja Sesuai Target

Berikut ini sembilan indikator kinerja yang sesuai target, antara lain:

1. Dokumen data dan informasi PAUD - Dikmas nasional, provinsi, kabupaten, dan kota dari target 545 dokumen terealisasi 545 dokumen atau 100%;
2. Dokumen program dan anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas dari target 47 dokumen terealisasi 47 dokumen atau 100%;
3. Dokumen evaluasi pelaksanaan rencana program dan anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas, dari target 8 dokumen terealisasi 8 dokumen atau 100%;
4. Jumlah dokumen laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen atau 100%;
5. Jumlah dokumen hukum, perundangan dan tata laksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari target 18 dokumen terealisasi 18 dokumen atau 100%;
6. Dokumen kerjasama, kehumasan, dan publikasi, dari target 11 dokumen

teralisasi 11 dokumen atau 100%;

7. SDM Ditjen PAUD-Dikmas meningkat kompetensi dan/atau kualifikasinya, dari target 117 orang teralisasi 117 orang atau 100%;
8. Jumlah dokumen ketatausahaan dan kerumahtanggaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari target 2 dokumen teralisasi 2 dokumen atau 100%;
9. Jumlah dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari target 12 dokumen teralisasi 12 dokumen atau 100%;

B. Indikator Kinerja Di Bawah Target

Terdapat satu indikator kinerja di bawah target yakni: koordinasi PUG Bidang Pendidikan, dari target 20 layanan teralisasi 0 layanan atau 0%;

BAB I PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas

Penguatan tata kelola yang baik dalam birokrasi pemerintahan merupakan faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan. Lemahnya pelaksanaan pemerintahan menyebabkan layanan pendidikan belum dapat dilaksanakan secara merata, bermutu, berkeadilan, dan akuntabel. Fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan, dan ketenagaan, serta dukungan infrastruktur secara umum turut menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Sebaliknya, kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan belum sepenuhnya dapat direalisasikan secara optimal karena masih rendahnya partisipasi masyarakat di bidang pendidikan. Kelemahan dan tantangan ini terasa semakin berat apabila dikaitkan dengan pelaksanaan program-program di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang memiliki sasaran masyarakat marginal yang memiliki kelemahan dan kendala baik ekonomis, geografis, infrastruktur pendidikan, sehingga kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan. Apalagi jika dikaitkan dengan fakta bahwa sebagian besar sasaran program PAUD dan Pendidikan Masyarakat tinggal di daerah pedesaan yang terpencil dan terisolir.

Sekretariat Direktorat Jenderal sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif, serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas. Dalam konteks pelaksanaan program-program di bidang PAUD dan Dikmas, maka tugas Sekretariat Direktorat Jenderal dapat dikatakan sangat strategis karena keberhasilan pelaksanaan program itu sangat bergantung pada efektivitas dan efisiensi pelayanan teknis dan administrasi maupun pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas masing-masing unit kerja di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, dan Dikmas. Oleh karena itu, kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal harus dilaksanakan secara terencana, terarah, dan

berkelanjutan agar mampu mendorong peran serta seluruh pihak dan memperlancar pelaksanaan program di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Dengan kata lain, akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan objektif sehingga pelaksanaan tugas dan fungsinya lebih berhasil dan berdaya guna untuk mendukung tercapainya visi dan misi PAUD dan Dikmas.

Pemerintah telah berusaha untuk mendorong agar setiap instansi pemerintah dapat melaksanakan tugasnya secara transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Secara formal, upaya ini mulai dilaksanakan pada tahun 1999 seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dipandang sebagai salah satu determinan yang menentukan keberhasilan mewujudkan pemerintahan yang baik.

Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas berusaha untuk melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 sebagai langkah preventif dalam melakukan pelaksanaan program tahun 2015. LAKIP disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2015 berdasar pada:

- Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas di antaranya:

- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja;
- sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan;
- sebagai penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
- sebagai bahan pertimbangan untuk berbagai kebijakan yang diperlukan

D. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 246 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebutkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 tersebut Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

- d. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- e. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
- f. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian dan fasilitasi bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
- g. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal;
- h. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal;
- i. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- j. Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- k. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

1. Bagian Perencanaan dan Penganggaran

Bagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, anggaran, dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, anggaran serta penyusunan laporan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas ini, Bagian Perencanaan dan Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
- e. Penyusunan laporan Direktorat Jenderal.

Untuk menjalankan fungsinya, Bagian Perencanaan dan Penganggaran memiliki 3 (tiga) Subbagian dengan tugas sebagai berikut:

- a. Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi serta penyusunan bahan kebijakan

di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

- b. Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- c. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta penyusunan laporan Direktorat Jenderal.

2. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas ini, Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- c. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara memiliki 3 (tiga) Subbagian dengan tugas sebagai berikut:

- a. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi dan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.
- b. Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, dan penghapusan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan akuntansi, rekonsiliasi, evaluasi, dan penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

3. Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian

Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, kajian dan fasilitasi bantuan hukum, organisasi, tata laksana serta urusan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas ini, Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. Penyusunan bahan kajian dan fasilitasi bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
- c. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian terdiri dari atas 3 (tiga) Subbagian dengan tugas sebagai berikut:

- a. Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, kajian dan fasilitasi bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal.
- b. Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan analisis dan penyempurnaan organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, dan penyusunan sistem dan prosedur kerja di lingkungan Direktorat Jenderal.
- c. Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, pengadaan, pengangkatan, mutasi, pengembangan, disiplin, dan pemberhentian pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal.

4. Bagian Umum dan Kerjasama

Bagian Umum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan serta penyusunan bahan koordinasi kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas ini, Bagian Umum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal; dan

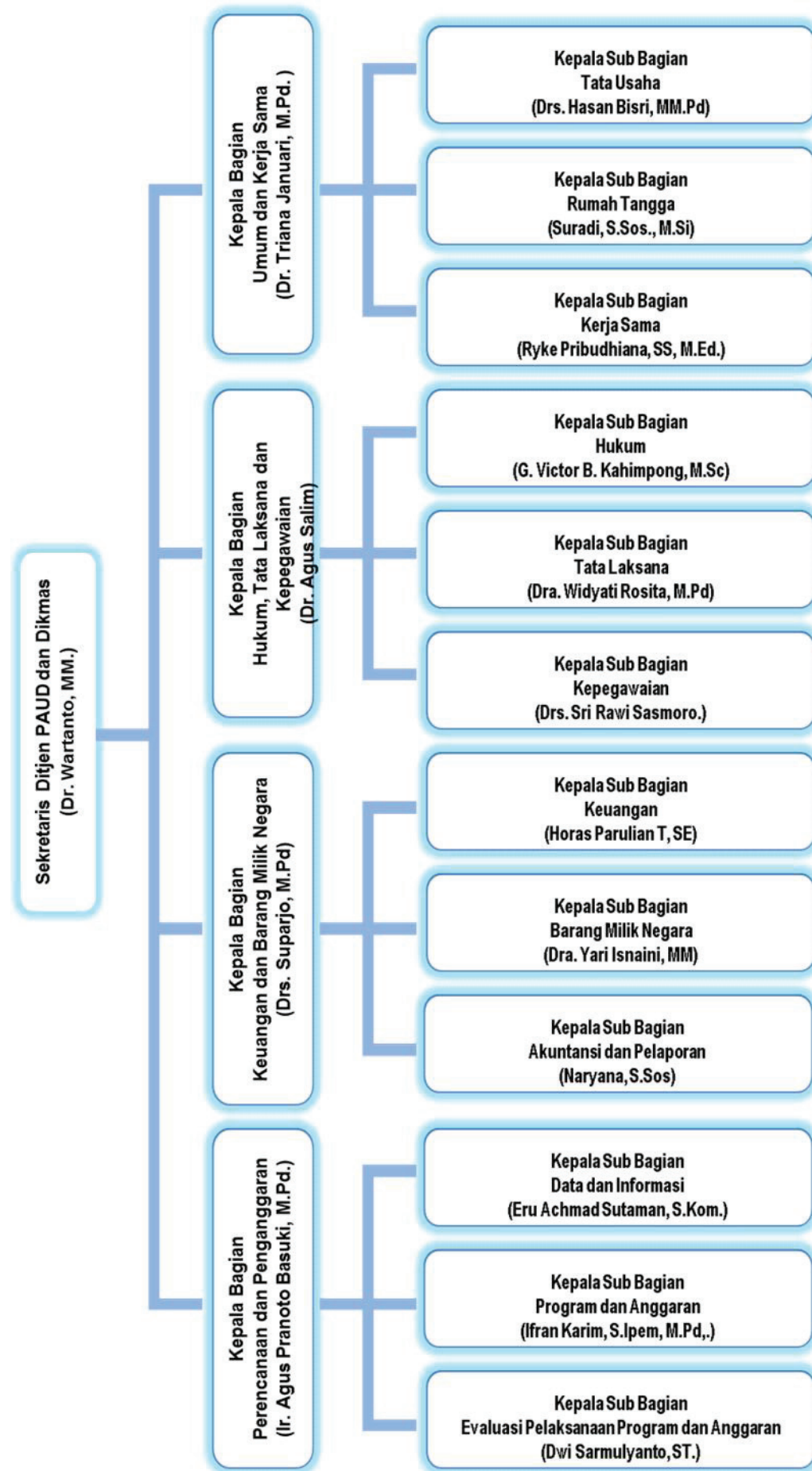
- c. Penyusunan bahan koordinasi kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Bagian Umum terdiri dari 3 (tiga) Subbagian dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan perpustakaan Direktorat Jenderal;
- b. Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan, keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pengaturan penggunaan sarana, prasarana, dan kendaraan dinas serta pengelolaan poliklinik di lingkungan Direktorat Jenderal;
- c. Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan bahan koordinasi kerja sama, pemberdayaan peran serta masyarakat, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Selengkapnya, struktur organisasi di lingkungan Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas tersaji dalam diagram di bawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Sekretaris Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2016

Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas menetapkan rencana kinerja dalam bentuk Perjanjian Kinerja tingkat Sekretariat Direktorat Jenderal yang ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas dengan Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas. Perjanjian Kinerja berisi sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan target kinerja Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Adapun perjanjian kinerja yang dimaksud seperti berikut.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Setditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016	
		TARGET	ANGGARAN
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi tata kelola dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Ditjen PAUD dan Dikmas	Dokumen data dan informasi PAUD - Dikmas nasional, provinsi, kabupaten, dan kota	545 dokumen	16,762,003,000
	▪ Dokumen Pengembangan DAPODIK PAUD dan Dikmas	545 dokumen	9,046,667,000
	▪ Dokumen Kebijakan PAUD dan Dikmas	1 dokumen	4,863,556,000
	▪ Dokumen Pendidikan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat	1 Dokumen	562,681,000
	▪ Dokumen Penyiapan SEAMEO-CECCEP	1 Dokumen	2, 635,940,000
	Koordinasi PUG Bidang Pendidikan	20 layanan	1,170,970,000
	• Koordinasi Pengarus-utamaan Gender Bidang Pendidikan	20 layanan	1,170,970,000
	Jumlah dokumen rencana program dan anggaran Ditjen PAUD - Dikmas	47 dokumen	9,173,609,000
	▪ Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	47 dokumen	8,566,124,000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016	
		TARGET	ANGGARAN
	▪ Penyusunan Rencana Program Kerja Teknis	47 dokumen	607,485,000
	Dokumen evaluasi pelaksanaan rencana program dan anggaran Ditjen PAUD- Dikmas	8 Dokumen	4,370,635,000
	▪ Evaluasi Pelaksanaan Anggaran PAUD dan Dikmas	2 Dokumen	1,167,377,000
	▪ Evaluasi Pelaksanaan Program PAUD dan Dikmas	2 Dokumen	1,970,230,000
	▪ Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen PAUD dan Dikmas	4 Dokumen	1,233,028,000
	Jumlah dokumen laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	47 dokumen	7,053,871,000
	▪ Pembinaan dan Administrasi Keuangan	47 dokumen	3,244,553,000
	▪ Laporan Keuangan SAI dan SIMAK BMN	47 dokumen	3,809,318,000
	Jumlah dokumen hukum dan tata laksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (SPM-NSPK)	18 dokumen	8,710,941,000
	▪ Dokumen Hukum Ditjen PAUD dan Dikmas	9 dokumen	4,720,057,000
	▪ Dokumen Tatalaksana Ditjen PAUD dan DIKMAS	9 Dokumen	3,990,884,000
	Dokumen kerjasama, kehumasan, dan publikasi	18 dokumen	6,097,610,000
	▪ Penyusunan Bahan Kerjasama Kehumasan dan Publikasi	5 Dokumen	1,363,780,000
	▪ Koordinasi dan konsolidasi program kerjasam PAUD Dikmas	5 Dokumen	1,385,900,000
	▪ Penyelenggaraan Humas	5 Dokumen	668,380,000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016	
		TARGET	ANGGARAN
	▪ Peningkatan Kerjasama Pendidikan Karakter Melalui Saka WBB	1 Dokumen	1,668,450,000
	▪ Koordinasi Pelaksanaan Pameran dan Hari Besar Pendidikan	2 Dokumen	1,011,100,000
	SDM Ditjen PAUD-Dikmas meningkat kompetensi dan/atau kualifikasinya	117 orang	5,216,736,000
	▪ Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Ditjen PAUD dan Dikmas	1 dokumen	2,199,281,000
	▪ Peningkatan Kapasitas Kepegawaian Ditjen PAUD dan Dikmas	117 orang	2,900,455,000
	▪ Penguatan dan Pengembangan Data Kepegawaian Ditjen PAUD dan Dikmas	1 Dokumen	117,000,000
	Dokumen BMN, ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Ditjen PAUD-Dikmas	2 dokumen	1,572,809,000
	▪ Pengelolaan Kerumahtanggaan sesuai perundang-undangan	1 Dokumen	153,801,000
	▪ Pengelolaan Ketatausahaan sesuai perundang-undangan	1 Dokumen	1,419,008,000
	Satker yang tertib dalam pengelolaan BMN	47 layanan	2,439,098,000
	▪ Dokumen Permasalahan BMN	1 Dokumen	569,284,000
	▪ Bimbingan Teknis/Asistensi Pengelolaan BMN	47 dokumen	831,845,000
	▪ Operasional Layanan Pengadaan	1 Dokumen	378,046,000
	▪ Pendataan BMN	1 dokumen	659,923,000

Untuk melaksanakan kegiatan dan merealisasikan perjanjian kinerjanya, Sekretaris Ditjen PAUD dan Dikmas, pada awal tahun 2016 menggunakan pagu anggaran sebesar Rp 152.053.882.000,-. Namun demikian dengan adanya revisi dan pemberlakuan *self-blocking* terhadap seluruh program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas, anggaran berubah menjadi Rp 107.749.502.000,-.

B. Kegiatan Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2016

Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas menetapkan satu sasaran kegiatan startegis yang digunakan sebagai arah dalam pelaksanaan kegiatan, yakni meningkatnya akuntabilitas dan transparansi tata kelola dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Ditjen PAUD dan Dikmas. Adapun untuk melihat hasil capaian dimaksud yakni dengan menetapkan indikator kinerja yang harus dipenuhi.

Terdapat setidaknya sepuluh indikator kinerja yang dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis di lingkungan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tetap menekankan pada kualitas pelayanan program dengan orientasi peningkatan kemampuan masyarakat yang berfokus pada penyediaan dokumen data dan informasi PAUD dan Dikmas; Pengembangan Kebijakan PAUD dan Dikmas; Penguatan Pendidikan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat, Persiapan pembentukan *SEAMEO CECCEP*; Penyediaan Dokumen Rencana, Program dan Anggaran dan Program Kerja Teknis; Penyediaan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Program dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen PAUD dan Dikmas; Penyediaan Dokumen Pembinaan dan Administrasi Keuangan, Keuangan SAI dan SIMAK BMN; Penyediaan Dokumen Hukum dan Perundang-undangan Ditjen PAUD dan Dikmas termasuk di dalamnya dokumen Ketatalaksanaan; Penyediaan Dokumen Publikasi dan Promosi; Penyediaan Dokumen Kerjasama dan Evaluasinya termasuk di dalamnya Perijinan Lembaga Asing, serta Dokumen Kehumasan melalui Pramuka dan Pameran.

Di samping itu, masih ditunjang oleh kegiatan-kegiatan pendukung lainnya terkait rutinitas seperti pengelolaan gedung dan arsip serta pengelolaan dan pendataan BMN; pemeliharaan perkantoran; pengadaan kendaraan bermotor; penyediaan perangkat pengolah data dan informasi; perawatan lift dan penambahan buku perpustakaan dan beberapa renovasi bangunan. Tidak lupa peningkatan SDM dalam bentuk pembinaan kepegawaian; peningkatan kapasitas pegawai; dan pengembangan data kepegawaian.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2016

Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati, Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas bertugas untuk mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban. Terdapat satu sasaran strategis yang harus dipenuhi yakni meningkatnya akuntabilitas dan transparansi tata kelola dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Ditjen PAUD dan Dikmas. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja dan sebagai bahan evaluasi kinerja, dapat dilihat dari pencapaian sepuluh indikator kinerja kegiatan Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas, seperti dalam penjelasan berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2015		Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
	Dokumen data dan informasi PAUD dan Dikmas Nasional, Provinsi, Kabupaten, dan Kota	545 dokumen	545 dokumen	545 dokumen	545 dokumen	100

Tabel 2. Indikator Data Informasi

Indikator kinerja “Dokumen data dan informasi PAUD dan Dikmas Nasional, Provinsi, Kabupaten, dan Kota” dari target 545 dokumen terealisasi 545 dokumen atau 100% yang didukung oleh proses perealisasi dokumen berikut ini:

- Dokumen Pengembangan Data dan Informasi dari target dokumen terealisasi 545 dokumen berupa Buku Data PAUD dan Dikmas Tahun 2016. Dokumen ini didukung oleh kegiatan yang sudah dilaksanakan yakni Pengembangan struktur database Dapodik, FGD Pendataan, Workshop dan Pengolahan Data, Pengelolaan SIM PAUD dan Dikmas; Pengembangan aplikasi Dapodik PAUD dan Dikmas; Sinkronisasi Pendataan PAUD dan Dikmas; dan Pengembangan Database terintegrasi.

- Naskah Kebijakan dan Pedoman PAUD dan Dikmas Tahun 2016, dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen. Naskah yang tersusun tersebut merupakan pedoman umum dalam pelaksanaan kebijakan dan program Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2016 untuk satker Pusat maupun Dekonsentrasi, yang juga didukung oleh workshop pembangunan berkelanjutan, FGD pembangunan berkelanjutan dan sinkronisasi kebijakan dan program tahun 2016 yang juga mendukung penyiapan kelembagaan SEAMEO CECCEP.



Gambar 2. Pertemuan Regional Penyiapan SEAMEO CECCEP

Kendala jumlah Kabupaten/Kota yang secara dinamis terus bertambah sebagai akibat pemekaran yang makin marak di daerah menyebabkan target yang selalu harus bertambah. Namun demikian perkiraan antisipasi kelebihan target tiap tahun selalu diperbaharui lewat pendataan yang rutin dilakukan untuk perbaharui data dalam sistem Dapodik yang sedang dikembangkan.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2015		Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
	Jumlah Kabupaten/Kota melaksanakan pengarusutamaan gender bidang pendidikan	330 Kab/Kota	330 Kab/Kota	20 Layanan	0 Layanan	0

Tabel 3. Indikator PUG Pendidikan

Indikator kinerja Jumlah Kabupaten/Kota melaksanakan pengarusutamaan gender bidang pendidikan, pada awal tahun 2016 memiliki target Renstra sebanyak 350 Kab/Kota atau 20 Kab/Kota untuk target tahunan 2016. Namun dengan adanya kebutuhan melonjak dari komponen langganan daya dan jasa maka dilakukan pemindahan anggaran yang awalnya diperuntukkan untuk pemenuhan indikator kinerja ini untuk menutupi kekurangan anggaran yang ada, sehingga hanya tersisa untuk melakukan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan terkait pengarusutamaan gender bidang pendidikan yang mendukung tugas Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang menggelontorkan bantuan penyelenggaraan PUG bidang pendidikan di 50 Kab/Kota. Dengan demikian fungsi dukungan manajemen dari Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas masih dapat dilaksanakan.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2015		Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
	Jumlah dokumen program dan anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas	47 dokumen	47 dokumen	47 dokumen	47 dokumen	100

Tabel 4. Indikator Program dan Anggaran

Indikator kinerja “Jumlah dokumen program dan anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas” dari target 47 dokumen terealisasi 47 dokumen atau 100%. Jumlah dokumen tersebut merupakan jumlah satuan kerja yang memiliki Rencana Program dan Anggaran, terdiri dari Rencana Program dan Anggaran di 34 Provinsi dan 13 satker di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas. Indikator ini didukung oleh kegiatan Penyiapan Bahan Penyusunan Rencana, Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

dan Program, Asistensi Penyusunan Rencana Program Daerah dan UPT, Bimbingan Teknis Pengembangan Program, Koordinasi Pemantapan Rencana Program, Workshop Renstra PAUD dan Dikmas, Penyusunan Program Kerja Ditjen PAUD dan Dikmas, dan Penyiapan Bahan Rencana Kerja.



Gambar 3. Rakornas Program PAUD Dikmas Tahun 2016

Kendala yang selalu ditemui dalam pemenuhan target indikator kinerja ini lebih pada penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan antar setiap satker yang ada di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas. Pemantapan dan komitmen pada saat kegiatan penyusunan program sangat mendukung untuk mengatasi kendala ini.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2015		Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
	Dokumen evaluasi pelaksanaan rencana program dan anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100

Tabel 5. Indikator Evaluasi Program dan Anggaran

Indikator kinerja “Dokumen evaluasi pelaksanaan rencana program dan anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas”, dari target 8 dokumen terealisasi 8 dokumen atau 100% dengan rincian realisasi terdiri dari satu dokumen Asistensi SAKIP, satu dokumen Asistensi Realisasi Daya Serap Kinerja dan Anggaran, satu

dokumen LAKIP Setditjen PAUD dan Dikmas Tengah Tahun 2016, satu dokumen LAKIP Ditjen PAUD dan Dikmas Tengah Tahun 2016, satu dokumen LAKIP Setditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2016, satu dokumen LAKIP Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2016 dan 1 dokumen kompilasi Laporan Monitoring Evaluasi Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2016.



Gambar 4. Penyusunan LAKIP Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2016

Walaupun tercapai target kinerjanya namun masih ada kendala yang ditemui seperti libur nasional yang makin banyak di tahun berjalan, padahal banyak agenda pemantauan dan evaluasi yang dijadwalkan. Namun demikian, kendala ini dapat diantisipasi dengan efektivitas waktu di awal tahun yang juga memperhatikan kegiatan satker lain dengan alokasi waktu pada saat penyusunan program kerja.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2015		Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
	Jumlah dokumen laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	47 dokumen	47 dokumen	47 dokumen	47 dokumen	100

Tabel 6. Indikator Laporan Keuangan

Indikator kinerja “Jumlah dokumen laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari target 47 dokumen terealisasi 47 dokumen atau 100%. Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini antara lain penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Indonesia (SAI) eselon I Pusat dan Laporan SAI satker daerah.

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini antara lain Laporan bulanan, semester I, semester II dan laporan tahunan SIMAK BMN yang terdiri dari 12 dokumen dan satu dokumen proses penghapusan dan satu dokumen proses inventarisasi di lingkungan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas. Sehingga dapat dilaporkan dengan akuntabilitas, transparan, akurat dan tepat waktu laporan SIMAK BMN di lingkungan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas.

Walaupun tercapai target kinerjanya, masih terdapat kendala yang ditemui seperti pengiriman Arsip Data Komputer (ADK) dari UPT Daerah yang tidak tepat waktu dan baru mengirim ADK setelah diminta dari Pusat. Termasuk juga petugas pelaporan keuangan di daerah sering kali bergantian sehingga tidak jelas siapa yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan.

Namun demikian agar kendala ini tidak menjadi permasalahan di masa yang akan datang telah diambil langkah-langkah antisipasi yakni membuat batas waktu penerimaan ADK dari UPT daerah dan adanya Surat Keputusan bagi pengelola keuangan paling cepat tiga tahun sehingga tidak terlalu sering berganti petugas pengelola laporan UPT Daerah dan setahun sebelum berganti sudah diturunkan pada calon petugas penggantinya.

Selain itu, keberhasilan pengelolaan keuangan dari para petugas keuangan yang telah bekerja maksimal dan menghasilkan pengelolaan keuangan yang tepat waktu di delapan UPT di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas yakni: PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat, PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah, BP PAUD dan Dikmas Sumatera Utara, BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur, BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Selatan, BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan, BP PAUD dan Dikmas NTB, serta BP PAUD dan Dikmas Papua.

Walaupun tercapai target kinerjanya, masih terdapat kendala yang ditemui

dalam hal pengelolaan keuangan, disebabkan adanya perubahan peraturan di bidang keuangan seperti pembayaran tunjangan kinerja bagi PNS yang menyesuaikan dengan Kelas Jabatan PNS terbaru berdasarkan Surat Keputusan yang baru terbit, sehingga pembayaran terlambat.

Namun demikian agar kendala ini tidak menjadi permasalahan di masa yang akan datang antisipasi yang dilakukan yakni dengan merespon kasus serupa dengan cepat terhadap penerbitan SK dan penyesuaian keuangan.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2015		Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
	Jumlah dokumen hukum dan tata laksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	100

Tabel 7. Indikator Hukum dan Tatalaksana

Indikator kinerja “Jumlah dokumen hukum dan tata laksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dari target 18 dokumen terealisasi 18 dokumen atau 100%.

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini antara lain: Workshop penanganan permasalahan hukum publik bidang PAUD dan Dikmas; Fasilitas bantuan hukum dan permasalahan hukum bidang PAUD dan Dikmas; Percepatan Tindak lanjut Temuan Pemeriksaan auditor internal dan eksternal bidang PAUD dan Dikmas; Rekonsiliasi Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Auditor Bidang PAUD dan Dikmas; FGD penyusunan peta bisnis proses Ditjen PAUD dan Dikmas; Penyusunan dan Uji Publik rancangan perundang-undangan bidang PAUD dan Dikmas; Penyusunan dan Evaluasi Pedoman Kegiatan Bagian Hukum dan Kepegawaian; Koordinasi dan Harmonisasi bidang Hukum dan Tatalaksana Ditjen PAUD dan Dikmas; Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang PAUD dan Dikmas; Workshop dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang SKB; FGD Uji Publik rancangan permendikbud tentang Sertifikasi; Review dan finalisasi Analisis Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan serta penghitungan beban kerja; Reviu dan finalisasi rincian tugas di lingkungan

Ditjen PAUD dan Dikmas; Pengembangan fasilitas Pendukung Reformasi dan Birokrasi internal; Penyusunan Pedoman Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; FGD dalam rangka Penyusunan Buku Informasi Sejarah Organisasi, Regulasi dan Gratifikasi dan Peningkatan Kapasitas Auditor Internal ISO 9001: 2008 Setditjen PAUD dan Dikmas.

Namun demikian kendala tetap ada disebabkan perubahan pelaksanaan pemerintahan secara keseluruhan. Di mana aturan-aturan perundang-undangan yang baru diterbitkan sebagai konsekuensi dari perubahan program-program pemerintahan.

Dengan demikian untuk tahun mendatang akan dilaksanakan kegiatan yang lebih fleksibel dan visibel artinya kegiatan yang mampu mengakomodasi perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan serta tata laksana organisasi.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2015		Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
	Dokumen kerjasama, kehumasan, dan publikasi	11 Dokumen	11 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	100

Tabel 8. Indikator Kerjasama dan Kehumasan

Indikator kinerja “Dokumen kerjasama, kehumasan, dan publikasi” dari target 18 dokumen terealisasi 18 dokumen atau 100%. Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini antara lain Penyusunan buku publikasi sebanyak delapan judul, yaitu buku pendidikan keluarga dalam perspektif masa kini; buku pentingnya pendidikan keluarga dalam pembentukan karakter bangsa; buku hubungan antar pusat dan daerah dalam pelaksanaan program PAUD dan Dikmas; buku Peranan Masyarakat dalam pelaksanaan program PAUD dan Dikmas; Buku Pelangi PAUD dan Dikmas; buku Sejarah Ditjen PAUD dan Dikmas; buku peranan Ditjen PAUD dan Dikmas dalam menghadapi MEA; buku peranan PAUD dan Dikmas dalam pengembangan potensi Masyarakat.



Gambar 5. Pelantikan
Pengurus Majelis
Pembimbing dan Pimpinan
Satuan Karya Pramuka Widya
Budaya Bakti

Selain itu penyediaan dokumen kerja sama dan perizinan sebanyak 4 dokumen, yaitu: Izin penyelenggaraan modal asing dalam bidang PAUD dan Dikmas; Izin tenaga kerja asing dalam bidang PAUD dan Dikmas; Izin belajar warga negara asing dalam bidang PAUD dan Dikmas; Izin penyelenggaraan Sekolah Pendidikan Kerja sama (SPK).

Di samping itu terdapat pelaksanaan Peningkatan Kerjasama Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pramuka Saka Widya Budaya Bhakti (WBB) dan kerja sama Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) dengan Ditjen PAUD dan Dikmas dan Penyusunan bahan publikasi melalui *website*, jurnalistik, majalah, dan advertorial pada media massa. Walaupun tercapai target kinerjanya, masih terdapat kendala yang ditemui seperti :

- Pada saat penyusunan buku publikasi terdapat kendala mengumpulkan bahan tulisan dari para penulis;
- Tenggang waktu pembuatan bahan publikasi sangat dekat dengan waktu penavandan:

- Undangan koordinasi rakor TMMD datang terlambat.



Gambar 6. Posko
Tentara Manunggal
Masuk Desa

Namun demikian agar kendala ini tidak menjadi permasalahan di masa yang akan datang telah diambil langkah-langkah antisipasi yakni :

- Pegiriman bahan tulisan untuk buku publikasi dilakukan secara berkala melalui email;
- Pembuatan bahan publikasi dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan dilaksanakan, pengeditan berita dilakukan secepat mungkin;
- Undangan koordinasi rakor TMMD dikirimkan lewat berbagai media seperti: fax/email, telepon dan lewat media sosial.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2015		Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
	SDM Ditjen PAUD-Dikmas meningkat kompetensi dan/atau kualifikasinya	104 orang	104 orang	117 orang	117 orang	100

Tabel 9. Indikator
SDM PAUD dan
Dikmas

Indikator kinerja “SDM Ditjen PAUD-Dikmas meningkat kompetensi dan/atau kualifikasinya”, dari target 117 orang terealisasi 117 orang atau 100%. Kegiatan

penunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini antara lain pelaksanaan: Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nonklasikal; Pendidikan dan Pelatihan Analisis Jabatan; Pendidikan dan Pelatihan Pembekalan Pegawai Baru di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas; Pendidikan dan Pelatihan Kesekretariatan (Notulensi dan Presentasi); Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan dan Disiplin PNS; Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Kepegawaian; dan Peningkatan Kapasitas Pegawai di lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas.

Secara keseluruhan tidak mengurangi target SDM yang dipersiapkan untuk pelaksanaan peningkatan kompetensi dan/atau kualifikasi SDM Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat, adapun kendala yang di hadapi adalah belum seluruhnya Pendidikan dan Pelatihan yang dibutuhkan Pegawai Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dapat terpenuhi.

Untuk selanjutnya perlu dilakukan inventarisir jenis-jenis Pendidikan dan Pelatihan yang dibutuhkan, serta menentukan prioritasnya jika tidak semua pelatihan dapat terlaksana. Dalam hal penyelenggaraannya, perlu dikembangkan kerjasama yang lebih luas dan mendalam dengan lembaga-lembaga profesional agar pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bisa benar-benar menjadi media/alat atau cara meningkatkan kompetensi dan/atau kualifikasi Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat.



Gambar 7.
Pelantikan Pejabat
Eselon III dan IV

Selain itu, kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini antara lain Penyusunan Pedoman/Petunjuk Teknis e-kepegawaian/e-office Ditjen PAUD dan Dikmas; Workshop pengembangan e-kepegawaian/e-office Ditjen PAUD dan Dikmas; Verifikasi dan Validasi Data Kepegawaian; Penyusunan Profil dan Data Kepegawaian Ditjen PAUD dan Dikmas; Verifikasi dan Validasi Data Pendukung Tunjangan Kinerja; Pengembangan SIMPEG Ditjen PAUD dan Dikmas; Pembangunan Aplikasi Pola Karir Pegawai; Pembinaan Kepegawaian Ditjen PAUD dan Dikmas; Pengelolaan dan Pengurusan Administrasi Kepegawaian dengan Instansi Terkait; Badan Pertimbangan Pengangkatan Jabatan dan Kepangkatan; Analisis Kebutuhan Formasi Pegawai; Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah; Pelantikan, Sumpah/Janji Jabatan atau PNS, serta Serah Terima Jabatan; Pemberian Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya; Bimbingan Teknis Tunjangan Kinerja; Pelaksanaan Sosiometri Pegawai di UPT Ditjen PAUD dan Dikmas; dan Sosialisasi Regulasi Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2015		Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
	Jumlah dokumen BMN, Ketatausahaan dan kerumahtanggaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1 dokumen	1 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100

Tabel 10. Indikator
Ketatausahaan dan
Kerumahtanggaan

Indikator kinerja “Jumlah dokumen BMN, kerumahtanggaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dari target 2 dokumen

terrealisasi 2 dokumen atau 100%. Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini antara lain penyusunan petunjuk pelaksanaan/pedoman ketatanaskahan; penyusunan petunjuk pelaksanaan/pedoman kearsipan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan/pedoman persuratan.

Walaupun tercapai target kinerjanya, masih terdapat kendala yang ditemui yakni terlambatnya Biro Umum Setjen Kemendikbud menerbitkan petunjuk pelaksanaan/pedoman panduan penyusunan tatanaskah, kearsipan dan

persuratan.

Namun demikian, ke depannya koordinasi dengan Biro Umum Setjen Kemendikbud untuk mempercepat penerbitan petunjuk pelaksanaan/pedoman penyusunan tatanaskah, kearsipan dan persuratan.

Walaupun tercapai target kinerjanya, masih terdapat kendala yang ditemui seperti melesetnya perkiraan anggaran untuk pembayaran langganan daya dan jasa yang telah tertutupi oleh pemindahan anggaran dari kegiatan PUG bidang Pendidikan.

Namun demikian agar kendala ini tidak menjadi permasalahan di masa yang akan datang telah diambil langkah-langkah antisipasi yakni setiap even yang akan dilakukan, intensitas koordinasi ditingkatkan dengan mitra dan *Event Organizer* (EO) sehingga pelaksanaan event yang akan dilakukan dapat terlaksana tepat waktu dan dilakukan penambahan anggaran untuk pembayaran langganan daya dan jasa lewat revisi anggaran yang lebih cermat.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2015		Tahun 2016		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
	Satker yang tertib dalam pengelolaan BMN	47 layanan	47 layanan	47 layanan	47 layanan	100

Tabel 11. Indikator Tertib BMN

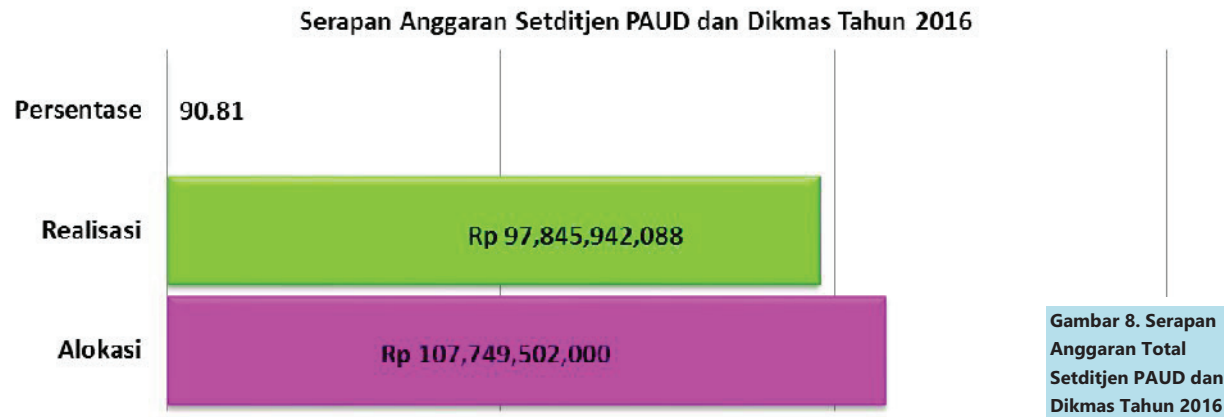
Indikator kinerja “Satker yang tertib dalam pengelolaan BMN”, dari target 47 dokumen terealisasi 47 dokumen atau 100%. Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini antara lain Laporan bulanan, semester I, semester II dan laporan tahunan SIMAK BMN yang terdiri dari 12 dokumen dan satu dokumen proses penghapusan dan satu dokumen proses inventarisasi di lingkungan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas. Sehingga dapat dilaporkan dengan akuntabilitas yang transparan, akurat dan tepat waktu dalam pelaporan SIMAK BMN di lingkungan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas. Walaupun tercapai target kinerjanya, masih terdapat kendala yang ditemui seperti terlambatnya pengiriman ADK laporan SIMAK BMN dari UPT Daerah.

Namun demikian agar kendala ini tidak menjadi permasalahan di masa yang akan datang telah diambil langkah-langkah antisipasi yakni perpanjangan waktu

periodik petugas pembuat proses laporan SIMAK BMN pada UPT daerah di lingkungan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas.

B. Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2016

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas selama tahun 2016, dari alokasi anggaran pasca *self blocking* sebesar Rp 107.749.502.000, terealisasi sebesar Rp 97.845.942.088,- Sehingga daya serap anggaran Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas pada Tahun 2016 ini mencapai 90,81%. (edisi sebelum rekon keuangan).



Dengan kondisi serapan anggaran per jenis belanja di Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas, sebagai berikut:

NO	JENIS BELANJA	PAGU AWAL	self blocking	PAGU AKHIR	REALISASI	%	SISA
1	Pegawai	9,600,800,000	-	9,600,800,000	8,008,582,395	83.42	1,592,217,605
2	Barang	99,979,776,000	10,875,779,000	89,103,997,000	81,707,563,613	91.70	7,396,433,387
3	Modal	9,544,705,000	500,000,000	9,044,705,000	8,129,796,080	89.88	914,908,920
Total		119,125,281,000	11,375,779,000	107,749,502,000	97,845,942,088	90.81	9,903,559,912

Tabel 12. Serapan Anggaran per Jenis Belanja

Dari keseluruhan pagu anggaran untuk Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas di atas, sebesar 58,07% atau Rp 62,568,282,000,- dialokasikan untuk merealisasikan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dengan Dirjen PAUD dan Dikmas. Di mana pada akhirnya tercatat telah digunakan untuk mewujudkan kinerja dimaksud sebesar Rp. 57,139,513,123,-

BAB IV

PENUTUP

Sebagai catatan bahwa sejak sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas bertindak sebagai koordinator dalam penerapan manajemen resiko, berbagai langkah antisipatif terhadap berbagai resiko dari proses perencanaan, sampai pelaporan program dan anggaran sudah berhasil dilakukan, cukup membantu dalam mengatasi hambatan dan kendala dalam penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terbukti realisasi anggaran dapat terpenuhi sesuai dengan target dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang secara otomatis meminimalkan penyimpangan di lapangan sehingga efektifitas dan efisiensi dapat meningkatkan kinerja yang optimal.

Sebagai hasil rekomendasi untuk pelaksanaan anggaran tahun 2016, maka kegiatan di Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas sudah dijadwalkan dimulai pada bulan Januari 2016, sehingga keterlambatan realisasi anggaran seperti yang sudah terjadi pada pelaksanaan anggaran sebelumnya tidak akan terulang kembali dan target realisasi anggaran makin besar peluangnya untuk dilampaui, namun demikian fase *self blocking* yang diberlakukan pada saat pelaksanaan anggaran cukup menjadi kendala terutama yang memerlukan biaya perjalanan dinas yang dominan sehingga harus dialihkan untuk kegiatan lain yang terkadang tidak berkaitan langsung dengan realisasi kinerja atau hanya pelaksanaan rutin biasa.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif, serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas melandaskan pada Rencana Strategis Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2015-2019, dan Perjanjian Kinerja Sekretaris Ditjen PAUD dan Dikmas yang telah ditandatangani bersama Dirjen PAUD dan Dikmas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2016 menyajikan berbagai keberhasilan maupun hambatan dan tantangan capaian strategis yang diraih oleh Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas pada tahun anggaran 2016. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian indikator kinerja, maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Secara umum pada tahun 2016, Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas telah memenuhi indikator kinerja dengan menghasilkan 545 Dokumen data dan informasi PAUD - Dikmas nasional, provinsi, kabupaten, dan kota; satu dokumen rapat Koordinasi PUG Bidang Pendidikan; 47 dokumen program dan anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas; 8 dokumen evaluasi pelaksanaan rencana program dan anggaran Ditjen PAUD dan Dikmas; 2 dokumen laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 18 dokumen hukum, perundangan dan tata laksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 11 dokumen kerjasama, kehumasan, dan publikasi; 117 SDM Ditjen PAUD-Dikmas meningkat kompetensi dan/atau kualifikasinya; 2 dokumen ketatausahaan dan kerumahtanggaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 12 dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan capaian pelaksanaan anggaran sampai akhir tahun 2016 dapat dari alokasi anggaran pasca *self blocking* sebesar Rp 107.749.502.000 (pagu awal Rp 119.125.281.000,-), terealisasi sebesar Rp

97.845.942.088,- Sehingga daya serap anggaran Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas pada Tahun 2016 ini mencapai 90,81% (sebelum rekon keuangan).

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berbagai pencapaian target indikator kinerja Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan koordinasi manajerial dalam hal perencanaan kinerja, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan yang secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen di lingkungan Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas.



Lampiran



Pengukuran Kinerja dan Anggaran Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi tata kelola dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Ditjen PAUD dan Dikmas	Dokumen data dan informasi PAUD - Dikmas nasional, provinsi, kabupaten, dan kota	545 dokumen	545 dokumen	100	16,762,003,000	15,152,739,844	90.40
	▪ Dokumen Pengembangan DAPODIK PAUD dan Dikmas	545 dokumen	545 dokumen	100	9,046,667,000	8,377,314,244	92.60
	▪ Dokumen Kebijakan PAUD dan Dikmas	1 dokumen	1 dokumen	100	4,863,556,000	4,556,369,600	93.68
	▪ Dokumen Pendidikan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat	1 Dokumen	1 Dokumen	100	562,681,000	464,913,100	82.62
	▪ Dokumen Penyiapan SEAMEO-CECCEP	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2,635,940,000	1,754,142,900	76.63
	Koordinasi PUG Bidang Pendidikan	20 Layanan	0 Dokumen	0	1,170,970,000	984,324,000	84.06

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	• Koordinasi Pengarus-utamaan Gender Bidang Pendidikan	20 Layanan	0 Dokumen	0	1,170,970,000	984,324,000	84.06
	Jumlah dokumen program dan anggaran Ditjen PAUD - Dikmas	47 dokumen	47 dokumen	100	9,173,609,000	8,650,833,320	94.30
	▪ Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	47 dokumen	47 dokumen	100	8,566,124,000	436,807,080	71.90
	▪ Penyusunan Rencana Program Kerja Teknis	47 dokumen	47 dokumen	100	607,485,000	3,916,109,700	89.60
	Dokumen evaluasi pelaksanaan rencana program dan anggaran Ditjen PAUD- Dikmas	8 dokumen	8 dokumen	100	4,370,635,000	3,916,109,700	89.60
	▪ Evaluasi Pelaksanaan Anggaran PAUD dan Dikmas	2 Dokumen	2 Dokumen	100	1,167,377,000	1,023,248,200	87.65
	▪ Evaluasi Pelaksanaan Program PAUD dan Dikmas	2 Dokumen	2 Dokumen	100	1,970,230,000	1,816,764,000	92.21
	▪ Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	1,233,028,000	1,076,097,500	87.27

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	PAUD dan Dikmas						
	Jumlah dokumen laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku	2 dokumen	2 dokumen	100	7,053,871,000	6,522,470,950	92.47
	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan Administrasi Keuangan 	47 dokumen	47 dokumen	100	3,244,553,000	2,793,465,100	97.89
	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Keuangan SAI dan SIMAK BMN 	47 dokumen	47 dokumen	100	3,809,318,000	3,729,005,850	89.44
	Jumlah dokumen hukum, perundangan dan tata laksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	18 dokumen	18 dokumen	100	8,710,941,000	7,790,915,165	89.44
	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Hukum Ditjen PAUD dan Dikmas 	9 dokumen	9 dokumen	100	4,720,057,000	4,196,803,615	88.91
	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Tatalaksana Ditjen PAUD dan DIKMAS 	9 Dokumen	9 Dokumen	100	3,990,884,000	3,594,111,550	90.06
	Dokumen kerjasama, kehumasan, dan publikasi	11 dokumen	11 dokumen	100	6,097,610,000	5,927,320,050	97.21

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Bahan Kerjasama Kehumasan dan Publikasi 	5 Dokumen	5 Dokumen	100	1,363,780,000	1,282,722,500	94.06
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan konsolidasi program kerjasam PAUD Dikmas 	5 Dokumen	5 Dokumen	100	1,385,900,000	1,380,383,800	99.60
	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggara n Humas 	5 Dokumen	5 Dokumen	100	668,380,000	657,009,100	98.30
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kerjasama Pendidikan Karakter Melalui Saka WBB 	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1,668,450,000	1,611,409,200	96.58
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Pelaksanaan Pameran dan Hari Besar Pendidikan 	2 Dokumen	2 Dokumen	100	1,011,100,000	995,795,450	98.49
	SDM Ditjen PAUD-Dikmas meningkat kompetensi dan/atau Kualifikasinya	117 orang	117 orang	100	5,216,736,000	4,370,150,355	83.77
	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan Pengelolaan 	1 dokumen	1 dokumen	100	2,199,281,000	1,561,580,492	71.00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Kepegawaian Ditjen PAUD dan Dikmas						
	▪ Peningkatan Kapasitas Kepegawaian Ditjen PAUD dan Dikmas	117 orang	117 orang	100	2,900,455,000	2,705,269,863	93.27
	▪ Penguatan dan Pengembangan Data Kepegawaian Ditjen PAUD dan Dikmas	1 Dokumen	1 Dokumen	100	117,000,000	103,300,000	88.29
	Jumlah dokumen ketatausahaan kerumahtanggaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	2 dokumen	2 dokumen	100	1,572,809,000	1,473,544,000	93.69
	▪ Pengelolaan Kerumahtanggaan sesuai perundang-undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	153,801,000	150,734,000	98.01
	▪ Pengelolaan Ketatausahaan sesuai perundang-undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1,419,008,000	1,322,810,000	93.22
	Jumlah dokumen Pengelolaan BMN sesuai	12 dokumen	12 dokumen	100	2,439,098,000	2,351,105,739	96.39

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	dengan peraturan perundang-undangan yang Berlaku						
	▪ Dokumen Permasalahan BMN	1 Dokumen	1 Dokumen	100	569,284,000	537,338,000	94.39
	▪ Bimbingan Teknis/Asistensi Pengelolaan BMN	1 Dokumen	1 Dokumen	100	831,845,000	809,388,000	97.30
	▪ Operasional Layanan Pengadaan	47 dokumen	47 dokumen	100	378,046,000	352,105,799	93.14
	▪ Pendataan BMN	1 Dokumen	1 Dokumen	100	659,923,000	652,273,940	98.84



Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Sekretaris Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

TUGAS

Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan tanggung jawab saya, akan:

1. Mengkoordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
2. Mengkoordinasi pemantauan dan evaluasi kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
3. Mengelola data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
4. Mengkoordinasi pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
5. Mengkoordinasi pengelolaan dan laporan keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
6. Menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian dan fasilitasi bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
7. Melaksanakan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
8. Mengelola kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
9. Mengkoordinasi penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
10. Mengelola barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
11. Melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

TARGET CAPAIAN

PROGRAM: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

KEGIATAN: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PAUD DAN DIKMAS

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016	
		TARGET	ANGGARAN
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi tata kelola dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Ditjen PAUD dan Dikmas	Dokumen data dan informasi PAUD - Dikmas nasional, provinsi, kabupaten, dan kota	545 dokumen	16,762,003,000
	▪ Dokumen Pengembangan DAPODIK PAUD dan Dikmas	545 dokumen	9,046,667,000
	▪ Dokumen Kebijakan PAUD dan Dikmas	1 dokumen	4,863,556,000
	▪ Dokumen Pendidikan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat	1 Dokumen	562,681,000
	▪ Dokumen Penyiapan SEAMEO-CECCEP	1 Dokumen	2, 635,940,000
	Koordinasi PUG Bidang Pendidikan	20 layanan	1,170,970,000
	• Koordinasi Pengarus-utamaan Gender Bidang Pendidikan	20 layanan	1,170,970,000
	Jumlah dokumen rencana program dan anggaran Ditjen PAUD - Dikmas	47 dokumen	9,173,609,000
	▪ Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	47 dokumen	8,566,124,000
	▪ Penyusunan Rencana Program Kerja Teknis	47 dokumen	607,485,000
	Dokumen evaluasi pelaksanaan rencana program dan anggaran Ditjen PAUD- Dikmas	8 Dokumen	4,370,635,000
	▪ Evaluasi Pelaksanaan Anggaran PAUD dan Dikmas	2 Dokumen	1,167,377,000
	▪ Evaluasi Pelaksanaan Program PAUD dan Dikmas	2 Dokumen	1,970,230,000
	▪ Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen PAUD dan Dikmas	4 Dokumen	1,233,028,000
	Jumlah dokumen laporan keuangan sesuai dengan	47 dokumen	7,053,871,000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016	
		TARGET	ANGGARAN
	peraturan perundang-undangan		
	▪ Pembinaan dan Administrasi Keuangan	47 dokumen	3,244,553,000
	▪ Laporan Keuangan SAI dan SIMAK BMN	47 dokumen	3,809,318,000
	Jumlah dokumen hukum dan tata laksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (SPM-NSPK)	18 dokumen	8,710,941,000
	▪ Dokumen Hukum Ditjen PAUD dan Dikmas	9 dokumen	4,720,057,000
	▪ Dokumen Tatalaksana Ditjen PAUD dan DIKMAS	9 Dokumen	3,990,884,000
	Dokumen kerjasama, kehumasan, dan publikasi	18 dokumen	6,097,610,000
	▪ Penyusunan Bahan Kerjasama Kehumasan dan Publikasi	5 Dokumen	1,363,780,000
	▪ Koordinasi dan konsolidasi program kerjasam PAUD Dikmas	5 Dokumen	1,385,900,000
	▪ Penyelenggaraan Humas	5 Dokumen	668,380,000
	▪ Peningkatan Kerjasama Pendidikan Karakter Melalui Saka WBB	1 Dokumen	1,668,450,000
	▪ Koordinasi Pelaksanaan Pameran dan Hari Besar Pendidikan	2 Dokumen	1,011,100,000
	SDM Ditjen PAUD-Dikmas meningkat kompetensi dan/atau kualifikasinya	117 orang	5,216,736,000
	▪ Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Ditjen PAUD dan Dikmas	1 dokumen	2,199,281,000
	▪ Peningkatan Kapasitas Kepegawaian Ditjen PAUD dan Dikmas	117 orang	2,900,455,000
	▪ Penguatan dan Pengembangan Data Kepegawaian Ditjen PAUD dan Dikmas	1 Dokumen	117,000,000
	Dokumen BMN, ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Ditjen	2 dokumen	1,572,809,000

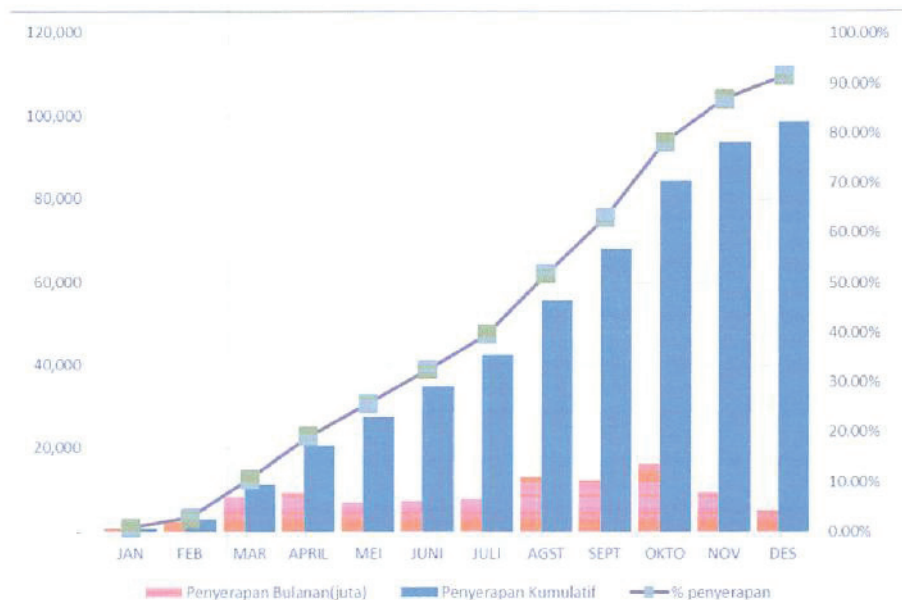
3

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016	
		TARGET	ANGGARAN
	PAUD-Dikmas		
	▪ Pengelolaan Kerumahtanggaan sesuai perundang-undangan	1 Dokumen	153,801,000
	▪ Pengelolaan Ketatausahaan sesuai perundang-undangan	1 Dokumen	1,419,008,000
	Satker yang tertib dalam pengelolaan BMN	47 layanan	2,439,098,000
	▪ Dokumen Permasalahan BMN	1 Dokumen	569,284,000
	▪ Bimbingan Teknis/Asistensi Pengelolaan BMN	47 dokumen	831,845,000
	▪ Operasional Layanan Pengadaan	1 Dokumen	378,046,000
	▪ Pendataan BMN	1 dokumen	659,923,000

Total Jumlah Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD dan Dikmas: Rp 107.749.502.000,-

4

Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2016 Sekretariat Ditjen PAUD dan Dikmas



(dlm juta)

KOMPONEN	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKTO	NOV	DES
Penyerapan Bulanan(juta)	828	2,187	8,287	9,287	6,987	7,298	7,726	13,098	12,287	16,287	9,287	5,098
Penyerapan Kumulatif	828	3,015	11,302	20,589	27,576	34,874	42,600	55,698	67,985	84,272	93,559	98,657
% penyerapan	0.77%	2.80%	10.49%	19.11%	25.59%	32.37%	39.54%	51.69%	63.10%	78.21%	86.83%	92%

EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Direktur Jenderal PAUD
dan Pendidikan Masyarakat

Harris Iskandar

Harris Iskandar

Jakarta, Agustus 2016
Sekretaris Ditjen PAUD
dan Pendidikan Masyarakat

Wartanto

Wartanto